

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KESENJANGAN GENDER ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA

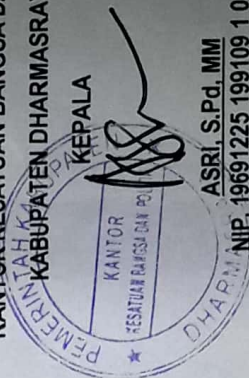
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	- Mengundang 30 Peserta Pengurus Inti Partai Politik yang lebih dominan laki-laki di bandingkan perempuan. adapun Jumlah Pengurus Inti dari keseluruhan Partai Politik berjumlah 50 Orang terdiri dari 45 Orang laki-laki dan 5 perempuan. - Permendagri 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Peranggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.	- Akses Masih kurangnya responsive gender dalam keikutsertaan sebagai pengurus inti partai Politik dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan dalam administrasi dan pengajuan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik - Partisipasi Kepengurusan inti Partai Politik jumlah laki-laki lebih banyak dari pada Perempuan. Presentase : Laki-laki= 90% Perempuan= 10%	Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruhi oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga	Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak.	- Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan terpenuhi dalam berkegiatan. - Meningkatnya pemahaman tentang administrasi partai politik	- Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender - Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku	Mengundang 30 orang peserta Pengurus Inti Partai Politik yang lebih dominan laki-laki di bandingkan perempuan.yaitu Laki-laki 90 % Perempuan 10 % Jumlah Pengurus Inti dari Partai Politik berjumlah 50 Orang terdiri dari 45 Orang Laki-laki dan 5 Orang Perempuan Kepengurusan Inti Partai Politik : PDJP 3 Orang Laki-Laki Hanura 3 Orang Laki-laki Demokrat 5 Orang PAN 3 Orang PKB 3 Orang Gerindra 3 Orang Golkar 3 Orang Nasdem 3 Orang PKS 3 orang Beringin Kaya 3 Orang	Output : Meningkatkan pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender Outcome: ➤ Meningkatkan pendidikan Politik masyarakat

Tujuan : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Administrasi Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik	➤ Manfaat Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam mengikuti kegiatan				PKPI 3 Orang PBB 3 Orang Garuda 3 Orang PSI 3 Orang Perindo 3 Orang PPP 3 Orang
--	---	--	--	--	--

Pulau Punjung, April 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN DHARMASRAYA



ASRI, S.Pd. MM
NIP. 19691225 199109 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, C.FrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB BOBBY R. RIZA, S.STP, M.Si NIP 19820521 200012 1 002
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
KODE PROGRAM	8.01.03		
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) ➢ Mengundang 30 Peserta Pengurus Inti Partai Politik yang lebih dominan laki-laki di bandingkan perempuan. Yaitu Laki-laki 90% Perempuan 10 % ➢ adapun Jumlah Pengurus Inti dari keseluruhan Partai Politik berjumlah 50 Orang terdiri dari 45 Orang laki-laki dan 5 perempuan. ➢ <i>Kepengurusan Inti Partai Politik :</i> PDIP 3 Orang Laki-Laki Hanura 3 Orang Laki-laki Demokrat 5 Orang PAN 3 Orang PKB 3 Orang Gerindra 3 Orang Golkar 3 Orang Nasdem 3 Orang PKS 3 orang Beringin Karya 3 Orang PKPI 3 Orang PBB 3 Orang Garuda 3 Orang PSI 3 Orang Perindo 3 Orang PPP 3 Orang ➢ Permendagri 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➢ Akses Masih kurangnya responsive gender dalam keikut serataan sebagai pengurus inti partai Politik dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik ➢ Partisipasi Kepengurusan inti dari Partai Politik jumlah laki-laki lebih banyak dari pada Perempuan. Presentase : Laki-laki= 90% Perempuan= 10% ➢ Manfaat Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam mengikuti kegiatan b. Penyebab Internal Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruhi oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga c. Penyebab Eksternal Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak.		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	➢ Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender	
		Tujuan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Administrasi Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik
		Alokasi Anggaran	

	Komponen/ Aktifitas 2		tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik
		Alokasi Anggaran	
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	43.995.700	
Capaian Program	Out put	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender	
	Out come	Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat yang responsif gender	

Pulau Punjung, April 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA



ASRI, S.Pd, MM
NIP. 19691225 199109 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A
			
KANDAM, S. Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198802 1 001	Drs. Andy Sumanto, C.FrA NIP 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZKA, S.STP, M.Si NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Sasaran Program		Pengurus Partai Politik
Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Latar Belakang	Dasar Hukum	➤ Permendagri 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.
	Gambaran Umum	Kegiatan Administrasi Partai Politik dilaksanakan setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Partai Politik
	Indikator Kinerja	Terlaksananya pembinaan Administrasi Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambah Pengetahuan pengurus partai politik tentang Pembinaan administrasi partai politik
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi tentang Pembinaan Administrasi Partai Politik
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesbangpol
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2021
Biaya		Rp. 43.995.700

Pulau Punjung, April 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN DHARMASRAYA

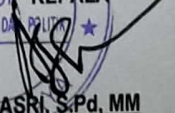


ASRI, S.Pd, MM
NIP. 19691225 199109 1 001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021

Urusan : Pemerintahan umum						
Unit Organisasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					
Sub Unit Organisasi	8.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				
Program	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik				
Kegiatan	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik				
Sub Kegiatan	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Menyesuaikan				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2021				
Kelompok Sasaran		Pengurus partai Politik				
Jumlah 2021		Rp. 43.995.700				
Jumlah 2022						
Jumlah 2023						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					
Target Kinerja						
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA
 KANTOR KEPALA
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ASRI, S.Pd, MM
 NIP. 19691225 199109 1 001